

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada era modern ini, di Asia Tenggara termasuk di Indonesia prostitusi semakin cepat berkembang dan terorganisir dengan baik. Perkembangan prostitusi ini kerap kali pula berkaitan dengan wisata lokal suatu negara. Sebuah penelitian yang dilakukan Truong (1992) mengatakan bahwa sejarah pelacuran-pelacuran lokal yang terjadi di berbagai wilayah merupakan dampak dari adanya industri. Salah satunya adalah lokalisasi yang terjadi di Muangthai merupakan dampak dari tuntutan industri pariwisata yang menuntut adanya layanan jasa seksualitas bagi turisme internasional (Truong, 1992). Di Thailand prostitusi dan pariwisata dianggap dua hal yang tidak terpisahkan. Industri seks di Thailand menjadi sasaran dari adanya transaksi perdagangan anak dan perempuan. Pada tahun 1993 diperkirakan 20.000 perempuan Burma terlibat dalam pelacuran di Thailand dan setiap tahunnya direkrut 10.000 anak dan perempuan yang lainnya (Hidayana, 2009).

Keterkaitan antara pelacuran dan wisata seks juga terlihat di berbagai wilayah di Indonesia, misalnya saja Batam, Tanjung Balai Karimun dan pulau-pulau wisata di Kepulauan Riau. Sindikat ini secara terorganisir membawa remaja perempuan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dipekerjakan di bar-bar, diskotik, karaoke, klab malam atau panti pijat yang pada akhir pekan banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan dari Singapura dan Malaysia. Bahkan, di Malaysia Timur, cukup banyak migran perempuan Indonesia yang ditipu dan dipaksa menjadi pekerja seks. Peningkatan prostitusi anak perempuan di wilayah

perbatasan terkait dengan mitos seksual seputar HIV/AIDS yaitu berhubungan seks dengan anak-anak lebih aman karena resiko tertular HIV/AIDS lebih kecil (Hidayana, 2009), sehingga hal ini membuat permintaan akan adanya seks pada anak perempuan masih menjadi kegemaran bagi penjaja seks.

Beberapa kenyataan di lapangan menunjukkan jumlah perempuan yang menjajakan dirinya semakin banyak dan tumbuh pesat di beberapa wilayah. Padahal jika bertolak pada pandangan seputar seks bebas, masyarakat menganggap prostitusi sebagai suatu bentuk penyimpangan sosial dalam masyarakat. Prostitusi umumnya dianggap sebagai masalah perzinahan dan sesuatu yang legal dan ilegal. Di berbagai negara, prostitusi dan perzinahan hampir sama konteksnya yaitu hubungan seks di luar nikah. Banyak negara dimana salah satunya Indonesia ketika aparat penegak hukum melakukan penangkapan terhadap pekerja seks, mereka akan dijatuhi hukuman sebagai pezinah. Inilah yang sangat tidak adil bagi para pekerja seks sebagai satu-satunya pekerja yang dijatuhi tindak hukuman. Prostitusi di Indonesia sendiri sangat dilarang dan dianggap berdosa, terutama karena rakyat Indonesia adalah rakyat yang beragama. Semua ini berangkat dari pandangan umum dalam melihat prostitusi yang sama dengan perzinahan (Koentjoro, 2009).

Tanggapan dari beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa pelacuran merupakan hal yang ilegal dan seharusnya segera dibubarkan di negara ini. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Dalam pemberitaan

di Koran online nasional Tempo¹, Menurut Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial Kementerian Sosial, Sonny W Manalu pada tahun 2013 terdapat 450 ribu lebih Pekerja seks Komersial (PSK) yang menghuni lokalisasi di seluruh Indonesia dan setiap tahun jumlahnya selalu naik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.500 orang diantaranya menghuni lokalisasi di berbagai daerah Jawa Timur (Ningtyas, 2013).

Berkaitan dengan fenomena-fenomena yang telah terjadi, alasan yang melatarbelakangi perempuan memilih untuk melacurkan dirinya menjadi hal yang penting untuk dijelaskan juga. Menurut Jones dkk (1994 dalam Koentjoro, 2004) alasan perempuan melacurkan dirinya dikarenakan adanya aspirasi material, motif berkuasa, sikap terhadap pernikahan, kemalasan, kelalaian, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan. Keterjebakan pelacur oleh materialisme, kesuksesan duniawi, dan persaingan materi yang timbul di antara mereka serta rekannya yang turut juga bermain di dalam dunia pelacuran. Selain itu, fenomena yang tampak melalui perilaku dan persaingan mereka dalam mendirikan rumah, membeli tanah dan barang-barang mewah seperti berpakaian, kosmetik, dan bahkan gaya hidup yang berfoya-foya. Dengan adanya sifat pamer ini mengakibatkan iri hati orang lain. Selain itu pula, keterlibatan orang tua atau suami yang ingin menunjukkan kesuksesan anak atau istri mereka menjadi salah satu faktor juga dalam mempengaruhi perempuan-perempuan melacurkan dirinya (Jones dkk 1994 dalam Koentjoro, 2004).

¹ Dijelaskan dalam Koran Tempo jumlah PSK semakin banyak setiap tahunnya, Sonny meminta pemerintah daerah agar lebih proaktif untuk mengurangi jumlah PSK dan kementerian Sosial siap membantu penanganan PSK.

Sebuah penelitian yang dilakukan Murray (1994) mengungkapkan bahwa desa tertentu di Indonesia sangat bangga dengan reputasi mengirimkan banyak perempuan ke Jakarta untuk menjadi pekerja seks karena mereka akan mampu membantu hingga 18 anggota keluarganya. Orang tua dan suami secara teratur menerima kiriman uang dari istri atau anak perempuannya yang menjadi pekerja seks, atau bahkan mengambil hasil kerja istri atau anak perempuannya (Murray, 1994). Berdasarkan pernyataan tersebut, pesatnya jumlah pelacur dengan alasan ekonomi kerap kali menjadi ujung tombak yang digunakan sebagai latar belakang untuk melacurkan dirinya.

Sejarah prostitusi Indonesia telah membuktikan adanya keterlibatan pemerintah dalam perkembangan prostitusi tidak dapat dipungkiri sumbangsinya. Seperti misalnya di Jakarta. Di Jakarta pada masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin telah menjadikan kawasan Kramat Tunggak sebagai tempat khusus prostitusi. Dengan luas sekitar 109 ribu meter persegi telah menjadikan kawasan ini sebagai kawasan prostisusi terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu. Tujuan didirikannya² kawasan khusus prostitusi ini dikarenakan para perempuan malam kerap kali berkeliaran di tempat-tempat umum seperti di kawasan Senen, Kramat, Ancol, Pejompongan dan beberapa kawasan lain agar para perempuan malam tidak berkeliaran di tempat-tempat umum tersebut. Disisi lain, menurut sejarawan di tengah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin pada waktu itu membutuhkan dana pembangunan yang sangat besar. Gubernur Ali memang dikenal sebagai salah

² Ide gila membuat lokasi khusus pelacuran ini sempat mendapat tantangan dari kelompok islam. Kelompok islam beranggapan bahwa Gubernur Ali Sadikin menyetujui perbuatan maksiat perzinahan. Namun, Gubernur Ali berkilah bahwa pembuatan lokalisasi justru untuk melindungi umat islam dari perbuatan maksiat karena bisnis prostitusi dikontrol. Akhirnya, organisasi masyarakat islam pada saat itu melunak dan membiarkan lokalisasi Kramat Tunggak berdiri.

satu gubernur yang kerap membangun infrastruktur Jakarta. Hasilnya, selama 11 tahun menjabat di Jakarta, ia banyak membangun jalan seperti jalan Pramuka dan jalan Pemuda, puskesmas, sekolah hingga museum dan pusat kebudayaan. Pada awalnya Kramat Tunggak hanya menampung sekitar 300 orang pelacur namun dalam perkembangannya ada sekitar 2000 orang pelacur di bawah kontrol 300 germo. Akhirnya, kehidupan ekonomi di kawasan ini berdenyut dengan banyaknya tenaga kerja yang menjadi buruh cuci, warung, juru parkir hingga tukang ojek. Bahkan, Kramat Tunggak telah sukses menjaring para anak buah kapal yang bersandar di Tanjung Priok untuk berwisata birahi di sana. Pada tahun 1999, Kramat Tunggak telah ditutup pada masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso. Akan tetapi, walaupun Kramat Tunggak ditutup bukan berarti pelacuran di Jakarta hilang. Pada masa modern ini pelacuran bersifat *borderless*. Tak perlu ada ruang untuk bertransaksi seksul. Tawar menawar cukup dari bisnis prostitusi dengan berbagai bentuk (CNN, 2015).

Berpindah di kawasan timur, salah satu pusat lokalisasi yang disebut-sebut terbesar di Asia Tenggara adalah Dolly. Keterikatan prostitusi dengan masyarakat menjadi hal yang sudah umum. Dolly³ menjadi kekuatan dan sandaran hidup bagi penduduk di sekitar kawasan Dolly. Terdapat lebih dari 800 wisma esek-esek, kafe dandgut dan panti pijat plus yang berjejer rapi, setidaknya setiap malam sekitar 9.000 lebih penjaja cinta, pelacur di bawah umur, germo, ahli pijat menawarkan layanan kenikmatan kepada para pengunjung. Tidak hanya seperti itu saja, Dolly juga menjadi tumpuan hidup bagi ribuan pedagang kaki lima,

³ Dolly dahulunya merupakan tempat pemakaman warga Tionghoa pada zaman penjajahan Belanda. Namun pemakaman ini disulap oleh seorang Noni Belanda yang bernama Dolly sebagai tempat prostitusi khusus bagi para tentanra negeri Belanda.

tukang parkir, dan calo prostitusi. Semua saling terkait menjalin sebuah simbiosis mutualisme (Andriyansyah, 2013), sehingga seperti halnya yang dikatakan Magid (2011) jajan seks di negeri ini tidak mungkin tergusur, prostitusi berkedok tempat hiburan, prostitusi berkedok panti pijat masih cukup marak. Bahkan di Batam, sebuah lokalisasi prostitusi di Sintai, Tanjungpinang diberi label “Pusat Rehabilitasi perempuan”. Rehabilitasi yang seharusnya ada proses memperbaiki sesuatu yang dianggap menyimpang, akan tetapi dalam prakteknya justru menciptakan para penyimpang-penyimpang baru yakni pelacur-pelacur baru (Magid, 2011). Adanya keterlibatan berbagai aktor menjadi peran penting yang mempengaruhi suburnya bisnis seks ini. Selain itu dalam pelacuran anak, faktor yang membuat prostitusi anak semakin berkembang antara lain meliputi berkembangnya jaringan kriminal yang mengorganisasi industri seks dan merekrut anak-anak, pihak berwenang yang korup yang terlibat dalam perdagangan seks anak, permintaan dari wisatawan seks dan pedofil, ketakutan terhadap AIDS sehingga membuat pelanggan menginginkan pelacur yang lebih muda (Kavkaz, 2015).

Penelitian yang dilakukan Siswanto (2013) menunjukkan terjadinya relasi sosial yang terjalin antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan masyarakat pada dasarnya merupakan relasi yang berorientasi materi/ekonomi. Proses interaksi ini berkaitan dengan prostitusi yang memiliki porsi yang lebih besar sehingga hubungan PSK dengan masyarakat pun masih berkaitan dengan hal tersebut. Selain itu, hubungan sosial yang bersifat saling menguntungkan menjadi penyebab utama terjalannya relasi sosial yang kondusif antara PSK dengan

masyarakat, padahal pada prinsipnya masyarakat menghawatirkan kelangsungan generasi mereka (Siswanto,2013).

Berkaitan dengan berbagai pemberitaan mengenai pelacuran di beberapa wilayah Indonesia, Salah satu tempat pelacuran yang terkenal juga di wilayah Jawa Timur yang semakin pesat dan terkenal dengan pelayanan seksualnya yakni Tretes. Tretes merupakan sebuah desa yang terletak tepat di bawah kaki pegunungan Welirang, tempat ini memiliki hawa yang sejuk dan dikelilingi dengan panorama alam yang mempesona. Tretes memang difungsikan sebagai tempat wisata, namun wisata ini tidak hanya berbentuk wisata alam saja akan tetapi terdapat juga wisata seksual. Keberadaan prostitusi di Tretes ini mendapat tanggapan kontra dari pemerintah dengan mengeluarkan peraturan No. 10 tahun 2001 tentang pemberantasan prostitusi. Hal ini dikarenakan citra kota Pasuruan yang memiliki banyak pondok pesantren yang dikenal dengan kota Santri. Akan tetapi walaupun peraturan telah dikeluarkan bisnis cinta sesaat ini tetap berkembang dengan pesat dan tetap eksis di tengah masyarakat sampai saat ini.

Penelitian Prasetyo (2013) mengungkapkan bahwasanya adanya bisnis prostitusi di Tretes tidak terlepas dari adanya peranan dari oknum pejabat pemerintahan dan organisasi masyarakat setempat, meskipun peran yang mereka tunjukkan tidak semencolok yang ditunjukkan oleh peran oknum aparat kepolisian namun posisi mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadikan mereka sebagai benteng terhadap arus perlawanan dari masyarakat yang kontra dengan bisnis prostitusi. Bentuk kerjasama yang ditawarkan pun hampir sama dengan apa yang dilakukan dengan pihak keamanan, hanya saja peran geromo lebih

terlihat, lobi-lobi dilakukan juga kerap dilakukan sendiri oleh geromo terutama ketika harus menghadapi oknum pejabat tinggi serta oknum anggota DPRD. Pertemuan untuk membahas aktivitas bisnis prostitusi yang dilakukan pada malam hari diluar jam dinas sang pejabat, lokasi pertemuannya pun berpindah-pindah dan tidak menutup kemungkinan dilakukan diluar wilayah Tretes (Prasetyo,2013).

Selain itu pula, dalam sebuah berita online Warta Bromo (21/01/2015) menjelaskan peran seorang mami yang memiliki relasi yang kuat dengan pihak hotel maupun jaringan lainnya di Tretes seperti tukang ojek. Dalam pembagian komisi antara para penjaja cinta, mucikari dan tukang ojek kerap dilakukan. Dari 100 persen hasil yang diterima langsung dibagi secara merata yakni sang mucikari dan pelacur memberi 10 persen kepada tukang ojek sehingga total komisi yang diterima yaitu 20 persen. Sedangkan untuk tukang ojek yang hanya menunjukkan kamar, villa atau wisma saja hanya mendapat komisi dari penjaga villa sebesar 15 persen. Kemudian, mengenai hasil yang didapatkan dari jasa seksual tersebut, sehari rata-rata perempuan malam ini bisa menerima *bookingan* antara 2 sampai 4 kali. Sekedar diketahui, bahwa tarif yang dipatok untuk *booking* para pelacur antara Rp 400 ribu sampai Rp 600 ribu per shorttime (3 jam). Dengan harga itu mereka diminta untuk menemani pelanggan berkaraoke, berjoget, memijat plus hingga memuaskan hasrat seksualnya. Para pelanggan akan merasa sangat puas jika pelacur pandai menyenangkan pelanggan dan pintar berkomunikasi. Bahkan, ada pelanggan yang pulang ke kampung halamnya dengan membawa uang Rp. 80 juta rupiah.

Suburnya prostitusi yang ada di Tretes tidak terlepas dari beberapa peran aktor yang menjadi kunci ramainya prostitusi Tretes. Penelitian yang dilakukan Bagong (2012) mengatakan salah satu ujung tombak memasarkan pelacur dan sekaligus menarik minat wisatawan adalah peran tukang ojek. Setiap harinya di Tretes selalu ada tukang ojek yang berprofesi ganda menawarkan villa sekaligus layanan seksualitas. Dalam beberapa aksinya, mereka melakukannya dengan sangat hati-hati dan jika menemukan hal-hal yang dirasakan janggal, para tukang ojek yang berprofesi sebagai calo tersebut akan menghindar dan lari tanpa disadari hal tersebut adalah pertanda akan digelarnya razia dari pihak pemerintah (Bagong, 2012).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan terjadinya bisnis seksual karena adanya pengaruh industri dan adanya keterkaitan dengan pariwisata. Selain itu pula, keterlibatan peran antara masyarakat dan pemerintah dalam perkembangan bisnis seksual tidak dapat dipungkiri sumbangsinya. Dalam studi yang berlokasi di Tretes ini merupakan tempat prostitusi yang tidak mendapat legalitas dari pemerintah Pasuruan. Hal ini berkaitan dengan Perda No. 10 Tahun 2001 yang melarang adanya praktek prostitusi di Tretes. Namun, eksistensi dan kesuburan prostitusi di daerah ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Keterlibatan aktor dari berbagai pihak yang memiliki peran masing-masing menjadi kunci langgengnya prostitusi Tretes ini.

Senada dengan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana peran para aktor di wilayah Tretes dalam membuat sebuah mata rantai yang sangat kuat dan teroganisir. Maka, mengacu pada latar belakang dan

beberapa penelitian dapat dirumuskan permasalahan utama yang ingin dikaji dalam studi penelitian ini adalah bagaimana jaringan sosial prostitusi di Kawasan Tretes Pasuruan, Jawa Timur. Kajian mengenai prostitusi di beberapa bagian dunia pada dasarnya bukanlah fenomena yang baru. Kajian mengenai pelacuran juga pernah dilakukan oleh Truong (1992) mengenai tumbuhnya pelacuran di Asia Tenggara yang berkaitan dengan industri pariwisata yang dikembangkan di wilayah tersebut. Isu mengenai perekrutan pelacur hingga di berbagai desa misalnya di utara Thailand mengenai perdagangan perempuan yang dilakukan oleh sejumlah aktor yang terlibat pada waktu itu. Kemudian, penelitian yang dilakukan Koentjoro (2004) meneliti mengenai keterlibatan perempuan menjadi pelacur yang memiliki hubungan dengan daerah sebagai penghasil pelacur dan pola-pola rekrutmen pelacuran sedangkan penelitian Matsui (2002) mengenai kekuatan perempuan Asia yang mengalami penindasan akibat pembangunan ekonomi hingga ada yang menjadi korban perdagangan perempuan dan dikirim ke Jepang. Terkait dengan hal tersebut, penelitian mengenai peran-peran aktor, faktor-faktor yang membentuk prostitusi dalam jaringan sosial, strategi-strategi yang dilakukan dalam mempertahankan jaringan sosial prostitusi kiranya belum banyak yang membahasnya secara detail.

I.2. Fokus Penelitian

Jaringan sosial prostitusi merupakan jaringan yang terbentuk karena adanya peran dan tujuan dari setiap aktor yang terlibat. Keterlibatan aktor dalam membentuk jaringan sosial yang kuat dan terorganisir dengan baik memberikan sumbangsi yang besar dalam praktek prostitusi di kawasan lokalisasi. Maka dalam

studi ini, secara lebih rinci beberapa pertanyaan kunci yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran latar belakang seseorang memilih menjadi pelacur? Termasuk dalam hal ini adalah alasan yang akan melatarbelakangi seseorang memilih menjadi pelacur dan tujuan yang ingin dicapainya ketika menjadi pelacur? Serta siapakah aktor yang telah berperan mempengaruhinya menjadi pelacur?
2. Bagaimana praktek-praktek prostitusi yang terjadi di kawasan Tretes? Dalam hal ini akan melihat pula peran-peran aktor yang lebih detail dengan mendasarkan pada pertanyaan bagaimana skema rekrutmen pelacur yang terjadi di kawasan Tretes? Bagaimana strategi yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam menarik pelanggan? Dan bagaimana penerapan strategi yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam pemenuhan keamanan aktivitas prostitusi di Tretes?
3. Bagaimana reaksi lingkungan sosial akibat prostitusi yang ada di kawasan Tretes? Meliputi pertanyaan mengenai bagaimana reaksi sosial masyarakat sekitar kawasan prostitusi Tretes dan reaksi tokoh masyarakat terkait dengan adanya praktek prostitusi di kawasan Tretes?
4. Bagaimana strategi yang dikembangkan oleh pihak yang terlibat dalam prostitusi Tretes dalam menangani mekanisme *social chaos* ketika terjadi intervensi pemerintah, intervensi organisasi masyarakat islam yang kontra dengan prostitusi dan strategi penanganan dalam menghadapi masyarakat sekitar?

I.3. Tujuan penelitian

Tujuan dalam studi penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah dibahas di atas. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan memahami gambaran mengenai latar belakang seseorang menjadi pelacur yang meliputi latar belakang seseorang menjadi pelacur dan tujuan seseorang menjadi pelacur serta menganalisis aktor-aktor yang telah mempengaruhinya menjadi pelacur.
2. Untuk mendeskripsikan dan memahami mengenai praktek prostitusi di lingkungan Tretes dan menganalisis skema rekrutmen pelacur, mendeskripsikan strategi-strategi yang dilakukan dalam menarik pelanggan dan mendeskripsikan pula mengenai strategi pemenuhan keamanan aktivitas dalam prostitusi.
3. Untuk mendeskripsikan dan memahami mengenai reaksi lingkungan sosial prostitusi yang terjadi di Tretes yang meliputi reaksi sosial masyarakat dan tokoh masyarakat terhadap praktek prostitusi di Tretes.
4. Untuk mendeskripsikan dan memahami strategi-strategi yang dilakukan oleh aktor dalam menangani *social chaos* yang meliputi intervensi pemerintah, intervensi organisasi masyarakat islam dan intervensi dari masyarakat sekitar tersendiri.

I.4. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Dari segi akademik, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya keberagaman bahan bacaan dan tema penelitian sosial di Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Diharapkan studi penelitian ini dapat memberikan gambaran yang holistik mengenai jaringan sosial dalam praktek prostitusi. Sehingga, studi-studi mengenai jaringan sosial prostitusi yang lebih detail dapat dikembangkan dalam berbagai penelitian selanjutnya.

- b. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan dan birokrasi penegakkan hukum, akademisi, aktivis LSM serta berbagai pihak yang tertarik dalam upaya penegakkan hukum, pembuat kebijakan dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam melihat sebuah realitas pelacuran. Oleh karena itu, diharapkan pula hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai rekomendasi untuk menyempurnakan aturan-aturan hukum dan perumusan kebijakan yang tepat dan teknik yang efektif dalam mengontrol perkembangan prostitusi. Dengan hal ini pula, tentunya membantu perempuan-perempuan untuk mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang kerap kali mereka hadapi di lingkungan prostitusi tersebut.

I.5. Kerangka Pemikiran Jaringan Sosial Prostitusi

I.5.1. Proses Terbentuknya Jaringan Sosial Prostitusi

Studi mengenai jaringan sosial memang beragam, oleh karena itu alangkah baiknya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari jaringan sosial itu sendiri. Jaringan sosial menurut Agusyanto (2007) merupakan suatu jaringan tipe khusus, dimana ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik lain dalam

jaringan adalah hubungan sosial. Maka, dapat dikatakan yang menjadi anggota suatu jaringan adalah manusia dan mungkin saja yang menjadi anggota suatu jaringan sosial itu berupa sekumpulan dari orang.

Selain itu, dalam jaringan sosial sendiri menawarkan suatu pendekatan baru untuk mengatasi atau memahami masalah-masalah kompleksitas perilaku dan struktur dengan level-level satu sama lainnya yakni : (1) jaringan sosial yang terjadi di satu sisi menciptakan struktur sosial, sementara di sisi lain struktur sosial yang diciptakan tersebut membatasi, baik tindakan individual maupun kolektif para individu yang terlibat di dalam saling keterhubungan. Struktur sosial yang dimaksud dalam hal ini meliputi aturan-aturan mengenai rekrutmen anggota dan tipe-tipe hubungan sosial, posisi-posisi sosial ekonomi dalam mana anggota dipetakan, dan regularitas-regularitas yang saling keterhubungan anggota-anggota yang menduduki posisi-posisi sosial di dalamnya (2) sikap dan perilaku individu ditentukan oleh konteks-konteks sosial di mana tindakan itu diwujudkan.

Keterlibatan aktor dalam proses terbentuknya prostitusi dan suburnya prostitusi memiliki peranan yang sangat penting. Sebagaimana dalam studi penelitian yang dilakukan oleh Truong (1994) mengenai Seks, Uang, dan Kekuasaan di Asia Tenggara yang kemudian menjelaskan keterkaitan berbagai aktor dalam sejarah pelacuran yang terjadi di wilayah Asia Tenggara. Truong menjelaskan bagaimana keterkaitan antara pelacuran, turisme dan perdagangan perempuan yang kemudian lebih dikenal dengan fenomena turisme seks internasional. Kata turisme internasional ini menunjukkan keterjalinan kekuatan politik, sosial, dan ekonomi yang mengkondisikan pengintegrasian Muangthai

pada waktu itu dan negara-negara Asia ke dalam produksi jasa *leisure*. Dalam hal ini, jaringan sosial prostitusi tidak terlepas dari sejarah pelacuran yang terjadi di beberapa kawasan.

Berbeda di negara industri tersebut, kebangkitan produksi jasa *leisure* pada kurun 1970-an dan 1980-an di banyak negara berkembang tidak dapat dipandang sebagai hasil dari kemajuan sosial (peningkatan penghasilan, penambahan waktu *leisure*, perbaikan kondisi kerja dan kesejahteraan). Di Asia Timur dan Tenggara, kebijakan turisme dan *leisure* sangat berkaitan dengan situasi geopolitik. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengambil pasar “*Rest and Recreation*” dari para personel angkatan bersenjata AS semasa konflik Indocina, terutama dalam hal ini adalah kasus Muangthai, Filiphina, Hongkong dan Jepang. Dengan melihat ini, Truong berargumen bahwa kebangkitan turisme dan keterkaitannya dengan pelacuran di Asia Tenggara adalah hasil dari kebijakan yang kearah investasi dalam industri jasa personal yang berperan dalam pemeliharaan kapasistas kerja angkatan bersenjata AS serta kelas pekerja kelas manajer internasional yang baru lahir.

Penelitian yang dilakukan Truong juga mengemukakan adanya struktur internasional produksi perjalanan dan turisme ditandai oleh dua ciri utama: (1) negara-negara industri sebagai penghasil turis utama sementara negara-negara dunia ketiga sebagai penerima dan (2) terdapat derajat tinggi integrasi dikalangan berbagai peyelenggara tur berbeda di negara-negara industri dalam hal keuangan, manajemen, penelitian dan pengembangan serta juga dalam pemasaran dan iklan.

Sehingga, sebagian besar produsen dan konsumen jasa ini terutama datang dari negara-negara industri.

Penyelenggara tur independen memberikan permintaan konsumen dengan memadukan secara serasi sebuah paket yang terdiri dari tempat di pesawat terbang, kamar hotel, restoran, transportasi darat serta jasa-jasa darat lainnya. Disini penyelenggara tur memiliki tugas ganda, yakni sebagai pedagang grosir yang menata komponen-komponen darat yang kemudian mempromosikan tur perjalanan dan di pihak lain penyelenggara tur melakukan kontrak sebuah program dengan maskapai udara yang mensponsorinya yang dipromosikan bersama-sama oleh penyelenggara tur dan maskapai yang bersangkutan dan dipasarkan oleh agen perjalanan serta pihak penjual tiket.

Diantara berbagai institusi internasional yang terlibat dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan turisme, Bank Dunia memiliki peran paling signifikan. Perhatian Bank Dunia dalam sektor turisme pertama kali pada tahun 1968 bahwa permintaan dunia terhadap perjalanan internasional tumbuh cepat dari permintaan terhadap ekspor barang perdagangan. Kemudian, hal inilah yang mengakibatkan dengan pelebagaan sebuah departemen tersendiri pada tahun 1970 yakni *Tourism Departemen Project*, yang bertanggungjawab dalam hal pembiayaan proyek-proyek turisme secara langsung. Selain itu pula, Bank Dunia membiayai pembangunan dan pemugaran lapangan udara, dengan proyek-proyek semacam itu seringkali tercakup dalam kategori pembangunan infrastruktur keseluruhan dan memang diacu memiliki hubungan dengan turisme.

Kebangkitan turisme yang telah terjadi tersebut, berbagai bentuk hiburan yang terkait dengan seks lainnya adalah merupakan artikulasi dari rangkaian ketidakmerataan hubungan-hubungan sosial, termasuk di dalamnya hubungan utara-selatan, hubungan-hubungan antara modal dan kerja, pria dan perempuan, produksi dan reproduksi. Artikulasi ini telah diperkuat oleh kepentingan pemodal dan negara karena itu tidak dapat dipandang sebagai hasil kesalahan kebijakan, atau efek dari kemiskinan yang tidak terkendali. Akan tetapi, hal ini merupakan keterjalinan berbagai bentuk kekuatan ekonomi dan politik, baik eksternal maupun internal. Industri turisme di Muangthai tersendiri telah membuat keterlibatan di antara berbagai aktor. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan pemodal berskala besar dalam pelayanan personal dan bisnis hotel.

Selama kehadirannya, industri turis dan hiburan ini telah beroperasi secara administratif, finansial dan legal yang mendukung pertumbuhan dan perluasan. Akan tetapi, ironisnya pelayanan seksual diproduksi pada batas-batas ambiguitas legal. Hal ini bisa dilihat ketika pelacur tertangkap sedang melakukan kegiatan seksual, pelacur akan dikenai ancaman sanksi hukum di bawah hukum pidana. Namun, pada saat yang sama pelacuran dilegalisasi di bawah peraturan-peraturan perindustrian. Sehingga, dapat dikatakan di bawah payung pidana pelacur ditindak *criminal promikuitas* yang didefinisikan sebagai pelayanan personal di bawah peraturan perdagangan dan sebagai pelayanan spesial oleh Departemen Kepolisian. Dengan adanya kontradiksi ini, seringkali membuat hubungan kekuasaan dan produksi dalam pelacuran cenderung menjadi kompleks dan beragam.

Dalam laporan *The Nation*, pada masa lalu perdagangan anak-anak dimanfaatkan bagi pelacuran telah diarahkan pada anak-anak pedesaan dan dilakukan oleh agen-agen komersial. Dewasa ini, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa perdagangan telah mempenetrasi komunitas-komunitas tribal yang tinggal disepanjang perbasatasan Burma dan terdapat semacam kerjasama oleh para pejabat yang bertanggungjawab dalam proyek-proyek pembangunan suku pegunungan.

Perdagangan anak-anak berkaitan pula dengan kebangkitan kembali praktek-praktek kuno mengenai penggagahan para perawan sebagai ritus untuk meningkatkan kejantanan seksual pria dan harapan hidup. Selain itu pula, berkaitan erat dengan sifat kompetitif dikalangan bentuk-bentuk hiburan yang berkaitan dengan seks, akhirnya mendorong praktek penggunaan anak-anak kecil yang akan diberikan pada konsumen. Sebagai contohnya, seorang gadis belia dijual kepada germo dengan harga 6.000 bath. Selain mendorong perdagangan internal anak-anak dan perempuan, ekspansi industri hiburan juga merangsang perdagangan Muangthai ke luar negeri. Mereka diekspor sejalan dengan direkrutnya para pelacur Muangthai untuk bekerja di berbagai panti hiburan di luar negeri Jepang, Eropa Barat, negara-negara Mediterania dan Timur Tengah.

Sementara itu, dalam prostitusi sangat erat adanya isu kekuasaan. Isu kekuasaan dalam pelacuran kerap kali pula didengar secara umum, kekuasaan dalam produksi melibatkan posisi dominan germo dan posisi subordinat pelacur. Di Muangthai, germo sebagai pihak ketiga yang memperantarai klien dengan pelacur yang memperoleh perlindungan ketat akibat aliansi kelas. Sebagaimana,

germo di masa-masa awal menawarkan pelayanan seksual perempuan Muangthai pada para personel militer AS adalah anggota Angkatan Bersenjata Muangthai. Setelah jangka waktu, pihak Angkatan Bersenjata Muangthai memperoleh kekuasaan sosial dan politik yang memungkinkan untuk mengontrol aparatus negara, keputusan kebijakan dan alat produksi dalam industri turisme dan hiburan. Hal ini ditambah lagi dengan keterlibatan pejabat-pejabat kepolisian dan militer, para pejabat pemerintah dikenali keterlibatannya pada usaha perhotelan, pusat-pusat hiburan dan pelacuran serta dalam pengiriman perempuan-perempuan Muangthai keluar negeri.

Senada dengan penelitian Truong, Matsui (2002) mengiyahkan sejumlah fenomena perdagangan perempuan yang terjadi di wilayah Thailand dan beberapa wilayah tetangganya. Perempuan-perempuan yang direkrut dalam dunia seksualitas merupakan perempuan yang diperjualbelikan. Dalam kasus yang terjadi di Thailand seorang perempuan berani menyuarkan kisah hidupnya di acara pembukaan Konferensi Dunia PBB Keempat mengenai wanita yang diselenggarakan di Beijing. Perempuan tersebut menceritakan kisahnya diperjualbelikan oleh seseorang yang merekrutnya di desanya yakni di utara Thailand yang menjanjikan untuk dipekerjakan di restoran. Tawaran ini diterimanya lantaran dia memimpikan untuk membeli tanah pertanian dan sebuah rumah untuk orang tuanya yang miskin. Namun, ketika sampai di Jepang dan bertemu dengan majikannya yang kemudian mengatakan, “Anda punya hutang sebesar 3,5 juta yen dan anda harus menebusnya dengan melacurkan diri”. Uang hasil perdagangan perempuan tersebut dibayarkan kepada kedua agen yakni agen

pihak Jepang dan Thailand. Perempuan yang menjadi korban ini tidak hanya dikurung namun juga dipukuli agar melayani pelanggannya setiap hari. Dan lebih tragisnya, perempuan ini tidak hanya dijual dalam satu kali namun dua kali. Maka hutang perempuan tersebut menjadi 7 juta yen ketika sudah berada di rumah bordil yang ketiga. Kemudian, dalam perjalanannya perempuan tersebut terkena HIV dan ketika ada penggerebekan oleh pihak imigrasi akhirnya ditahan dan kemudian di deportasi. Setelah itu, nasibnya lagi perempuan malang ini dijebloskan ke wisma yang berlokasi di pinggiran kota Bangkok. Di sana dia diwawancarai wartawan lepas Jepang dan menayangkan semua pengalamannya walaupun wajah serta nama disamarkan. Akan tetapi, program televisi tersebut mengungkapkan semua yang akhirnya membuatnya tidak bisa kembali ke desanya.

Sejarahnya, Perempuan Thai mulai dikirim untuk bekerja di industri seks Jepang pada pertengahan tahun 1980-an. Pada tahun 1990 jumlah perempuan yang diperbudak meningkat dramatis. Perempuan-perempuan yang dikirim ke Jepang dengan menggunakan visa turis atau paspor palsu sedangkan perempuan Filipina kebanyakan datang ke Jepang secara sah dengan menggunakan visa penghibur. Di Jepang sendiri, yakni di kota prefektur Nagano dan Ibaragi dijuluki dengan *Little Bangkok* karena ratusan perempuan Thai tinggal disana. Perempuan-perempuan tersebut dimanfaatkan sebagai aset finansial yang penting di kawasan yang di dominasi oleh organisasi kriminal (*yakuza*), dalam aksinya jika *yakuza* memiliki sepuluh perempuan Thai dan dapat meraih keuntungan ratusan juta satu yen. Maka, dari itu *yakuza* mengurung perempuan-perempuan Thai dan memaksa

mereka untuk melacurkan diri. Dan jika para perempuan Thai menolak untuk melakukan hal tersebut, maka mereka akan dikuasai lewat kekerasan, ancaman, perkosaan, dan obat bius.

Jepang memang menjadi tujuan bagi perempuan yang telah diperjualbelikan dalam perbudakan seks, karena industri seks di Jepang membesar dalam skala yang besar dan mencapai keuntungan sebesar lebih dari 4 triliun yen setiap tahunnya, hal ini setara dengan jumlah anggaran pertahanan nasional Jepang atau 1 persen dari Produk Penghasilan Nasional (GNP). Industri seks mengimbangi kekurangan gadis-gadis muda Jepang lewat dengan mengimpor mengimbangi perempuan Asia yang sewanya lebih murah. Alasan ekspansi industri seks ini mencakup dua hal yakni: pertama, pengaruh kebiasaan membiarkan pelacuran sampai kini merupakan kesinambungan dalam masyarakat Jepang dari sistem perizinan pelacuran pada masa era feodalnya, dan kedua, saat ini bermunculan banyak ksatria perusahaan yang letih karena adanya kompetisi ketat dalam dunia usaha dan membutuhkan hiburan untuk menyegarkan kembali gairah dalam bekerja.

Sementara itu, di Indonesia dalam studi yang dilakukan oleh Koentjoro (2004) penelitian yang dilakukannya ini berawal dari pertanyaan pribadinya mengenai asal-usul pelacur yang berasal dari daerah tertentu. Hal ini dilatarbelakangi dengan fenomena pelacuran yang terjadi di Batam mengenai risetnya yang berjudul Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Pariwisata dan Permasalahannya di Pulau Batam. Riset ini bertujuan khusus dan mendalam masalah buruh perempuan dan peran perempuan di sektor pariwisata pulau Batam.

Wisata hiburan di Batam pun berkembang dengan cepat, manakala lahirnya turisme yang berasal dari Cina Malaysia dan Cina Singapura yang menghabiskan akhir pekannya di pulau Batam.

Menurutnya, dunia pelacuran tidak terlepas dari revolusi triple T (transportasi, telekomunikasi dan turisme) yang sedang melanda dunia. Hal ini memiliki hubungan yang erat antara perpindahan penduduk dengan peningkatan jumlah pelacuran di negara dunia ketiga di Asia. Kemudian dikarenakan pelacuran tidak saja menawarkan hal yang mudah dalam mencari uang namun juga membuka bidang jasa yang luas dalam hal pelayanan seksual. Dalam kasus ini contohnya, Batam.

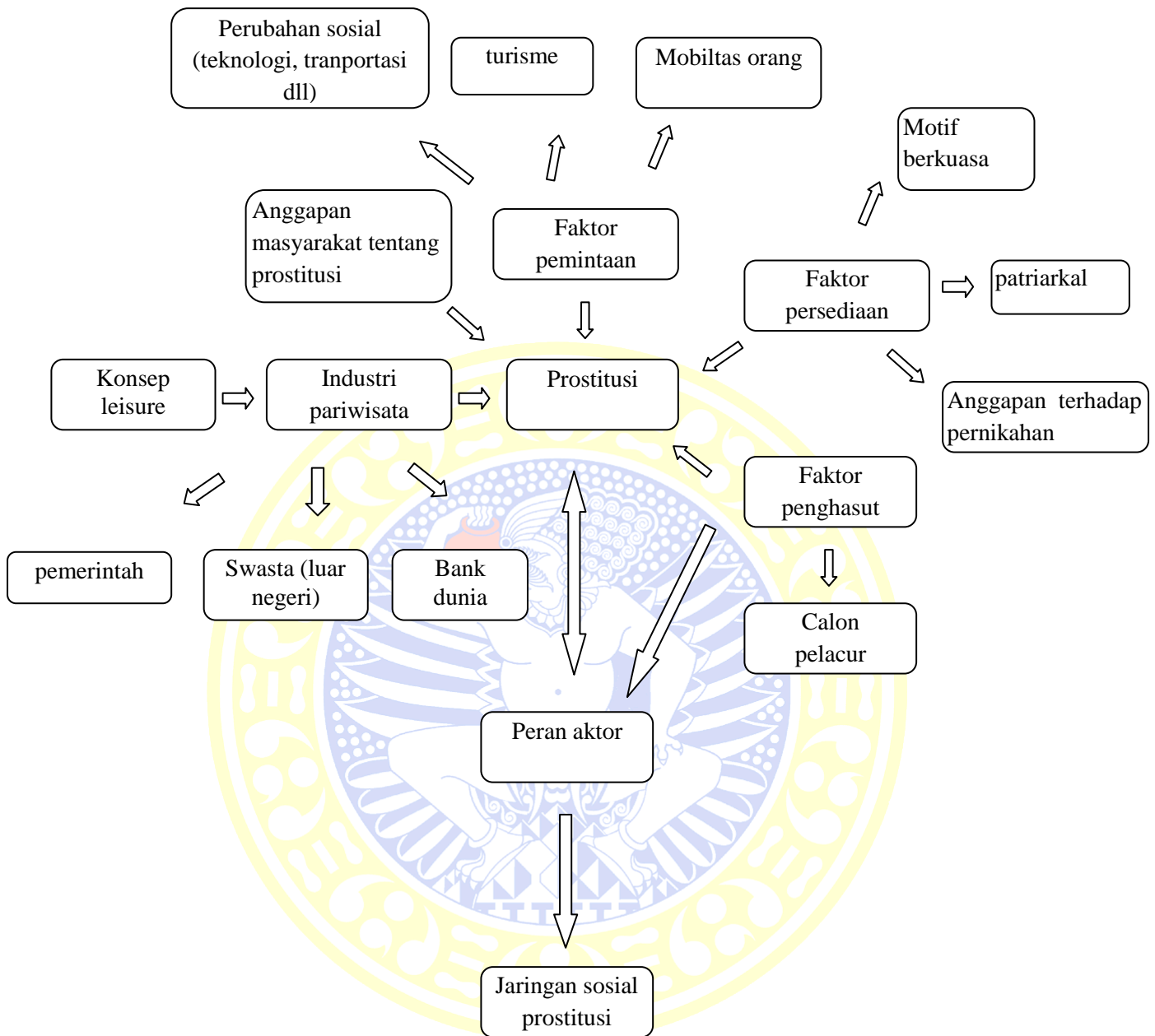
Menurut Koentjoro, seseorang masuk dalam dunia pelacuran dikarenakan adanya faktor individu dan lingkungan atau sosio kultural yang saling berhubungan dan menimbulkan masalah yang kompleks yang akhirnya mempengaruhi pertumbuhan pelacuran. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu faktor-faktor tersebut berkembang di daerah tertentu sehingga daerah tersebut menjadi daerah penghasil sumber pelacur di Indonesia. Sementara di daerah lain tidak berkembang seburuk di daerah sumber penghasil pelacur. Di Indonesia sendiri Koentjoro mengacu pada beberapa penelitian yang dilakukan oleh Krisna (1979) dan Muray (1991) yang memperlihatkan bahwa di beberapa daerah tertentu misalnya di Jawa Barat, penduduk di wilayah tersebut merasa bangga atas status desa mereka sebagai daerah penghasil pelacur. Alasan dibalik ini tidak terlepas dari kemampuan seorang pelacur yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya anggota keluarganya.

Koentjoro juga menjelaskan mengenai interaksi atas tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi peningkatan pelacuran. Interaksi ini menjadi hal yang sangat penting dalam substansi prostitusi yakni: (1) adanya faktor permintaan sebagai faktor yang menarik (2) faktor persediaan sebagai faktor yang mendorong dan (3) faktor perantara yang memfasilitasi makin lajunya pertumbuhan pelacuran yang ada di Indonesia. Faktor permintaan ini meliputi dari sektor turisme, mobilitas orang dan perubahan sosial sedangkan faktor persediaan ini meliputi sikap wanita terhadap pernikahan, motif untuk berkuasa, budaya dan kepercayaan seperti hegemoni laki-laki yang mendorong anak-anak atau istri mereka yang menjadi pelacur. Dan faktor permintaan dan persediaan ini tetap saling memenuhi dengan baik karena adanya peran penghasut (*investigator*) yakni sebagai penyalur penyedia. Dimana hal ini dipengaruhi pula dengan adanya faktor lingkungan mikro yang meliputi materialisme dan nilai pernikahan sedangkan faktor makronya yakni kemiskinan dan ketiadaan kesempatan kerja.

Selanjutnya, dalam hal penyaluran dan permintaan, *investigator* bekerja dalam tiga cara yakni : (1) cara pasif, menjadikan mantan pelacur sebagai model sosialisasi. Kehidupan mewah para mantan pelacur sengaja ditawarkan oleh penghasut agar mereka cemburu dan mereka tertarik untuk masuk dalam pelacuran. Bagi mereka dari komunitas yang memuja kekayaan, hal ini sangat efektif untuk menarik mereka dalam bergabung dengan pelacuran namun tentunya hal ini tidak efektif jika dilakukan pada komunitas yang kurang memuja kemewahan. (2) Secara aktif, mempengaruhi orang tua dan perempuan yang potensial tergoda untuk memasuki pelacuran dengan iming-iming imbalan materi

yang melimpah yang dapat meningkatkan status keberadaan mereka dalam budaya yang memuja kekayaan. (3) Penghasut juga secara aktif menjembatani antara permintaan dan persediaan dengan cara membuka saluran permintaan dan menjaga persediaan. Apa yang dilakukan penghasut dalam hal ini adalah menyediakan pelacur yang dapat diakses secara langsung dan akan membuka peluang bagi pelacur-pelacur baru dari desa untuk disalurkan ke kota. Maka, selain dari persediaan, penghasut pada akhirnya menjadi pencipta permintaan dan penjaga persediaan

Keterlibatan berbagai aktor dalam proses terbentuknya prostitusi menjadi hal yang penting dan memegang peran yang sangat besar. Aktor-aktor tersebut membentuk sebuah mata rantai yang kemudian dikenal dengan jaringan sosial prostitusi yang terorganisir dengan baik. Selain itu, strategi-strategi yang dilakukan dalam membentuk jaringan sosial prostitusi menjadi titik kuat dalam perkembangan prostitusi.



Skema 1.1. Proses terbentuknya jaringan sosial prostitusi

I.5.2. Dinamika Keberadaan Prostitusi Di tengah Masyarakat

Proses terbentuknya prostitusi tidak terlepas dari adanya keterlibatan aktor-aktor yang dapat mempengaruhi substansi prostitusi. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam perkembangannya prostitusi mendapat tanggapan dari beberapa pihak yang tidak menyetujui adanya prostitusi tersebut dan tentunya menjadi faktor penghambat.

Studi Truong (1994) menjelaskan adanya undang-undang untuk menghapuskan praktek-praktek pelacuran yang ada di Muangthai. Akan tetapi dalam realitasnya sangat sulit untuk diterapkan di wilayah tersebut. Dalam hal ini sebagaimana seorang Jenderal Departemen Kepolisian di wilayah Muangthai menyebutkan empat alasan utama dari sulitnya menerapkan Undang-Undang penghapusan Pelacuran yakni:

1. Banyak polisi dari berbagai kedudukan memiliki hubungan dengan para pemilik perusahaan atau memiliki perusahaan sendiri. Sehingga, bagi polisi yang jujur akan tetapi memiliki pangkat yang rendah terhalang dalam menjalankan tugas akibat tekanan dari atasan mereka. Maka, permintaan untuk melakukan investigasi terhadap permasalahan tersebut seringkali tidak memperoleh perhatian yang serius dari pihak yang berwenang. Mereka yang terkena tuduhan biasanya sekedar mendapat teguran dan hanya bisa membebaskan dirinya dari tuduhan tersebut.
2. Ketika terjadi penangkapan yang ditangkap hanya pelacur, sementara gerombolan dapat melarikan diri dikarenakan informasi yang didapat terlebih dahulu dibandingkan dengan pelacur. Setelah itu, mereka akan melakukan

kembali fungsinya sebagai germo, sedangkan pelacur yang tertangkap akan ditahan dan diadili. Namun, pelacur juga bisa bebas ketika dibayar terlebih dahulu oleh majikannya. Akan tetapi, setelah bebas para pelacur ini harus melakukan kerja ekstra untuk membayar kembali pinjaman tersebut.

3. Pada masa penyidikan, para pejabat politis tidak melakukan usaha untuk melacak dan meneliti para pemilik bisnis. Bila si pemilik tertangkap langkah yang diambil adalah menyuap polisi-polisi yang tidak jujur dengan memanfaatkan berbagai celah hukum ataupun kesalahan fakta untuk membebaskan mereka (mereka dikenai dengan tuduhan yang lainnya bukan tuduhan pelacuran).
4. Bila ada mucikari yang tertangkap karena menjerat perempuan masuk dalam dunia pelacuran dengan cara yang tidak sesuai misalnya dengan cara penipuan dan mereka tertangkap, pada umumnya mereka akan melakukan negosiasi dengan para perempuan yang dipaksanya itu atau keluarga mereka harus membayar kompensasi agar keluarga tersebut membatalkan tuduhan.

Selain keterlibatan para pejabat dalam bisnis pelacuran dimana mucikari bebas dari tuduhan pidana dan denda, penerapan hukum itu sendiri berjalan tidak objektif. Penangkapan ini hanya digunakan sebagai ajang tontonan yang diorganisir untuk mempertontonkan pada masyarakat bahwa polisi menegakkan hukum. Pelacur-pelacur yang agak tua dipilih sebagai korban dalam pertunjukkan ini. Tidak ada yang menolong untuk membayarkan uang mereka, mengingat

menurunnya kadar penampilan dan kapasitas pemasukan mereka. Dan kemudian mereka disalurkan ke pusat-pusat rehabilitasi kesejahteraan negara.

Sementara itu, Matsui (2002) menjelaskan dalam praktek prostitusi yang melibatkan perempuan untuk tujuan perdagangan seksualitas mendapat tanggapan dari adanya gerakan-gerakan dari perempuan-perempuan untuk memperjuangkan dan bahkan untuk menyelamatkan perempuan-perempuan yang akan diperdagangkan. Pada tahun 1922, terjadilah gerakan demokratis Thai yang menggulingkan militernya kemudian lahirlah pemerintah sipil yang pertama melancarkan kampanye untuk menghapuskan pelacuran anak-anak. Serangan pada rumah-rumah bordil dan perpanjangan masa wajib belajar sampai SLTP dan SLTA telah berhasil mengurangi jumlah gadis-gadis Thai yang dijual untuk tujuan prostitusi. Namun, untuk menyeimbangkan berkurangnya kesediaan para gadis Thai mereka (para agen perdagangan) memiliki alternatif lain dengan menargetkan gadis-gadis remaja dari negara-negara tetangganya yakni gadis-gadis Birma (Myanmar) sekitar 40.000 orang dijual ke Thailand. Sejumlah gadis dikirimkan dari utara perbatasan Thailand ke Bangkok dan kawasan turis seperti Chiang Mai dan Pattaya. Jumlah wanita pelacur Birma terbesar terpusat di Ranon, pelabuhan ikan di selatan Thailand, mereka terkurung dalam lebih dari empat puluh rumah bordil dikelilingi pagar-pagar elektronik.

Kemudian gadis-gadis dari kelompok suku-suku minoritas di Provinsi Yunnan di selatan Cina juga dikirimkan ke bagian utara Thailand, dan kemudian dikirim ke Malaysia dan Hongkong. Selain itu pula, di Laos jumlah gadis muda yang dijual ke Thailand semakin bertambah, dan mereka terkadang berhasil

diselamatkan dari rumah-rumah bordil di dekat perbatasan. Disamping Thailand dan sejumlah negara tetangganya di Nepal banyak perempuan juga yang menjadi korban perdagangan seksual di India dan lebih parahnya banyak yang tertular penyakit HIV/AIDS. Oleh karena itu, banyak lokakarya yang bertemakan perdagangan perempuan diadakan di forum LSM pada konferensi mengenai perempuan di Beijing. Mereka berkesimpulan bahwa perlu memperkuat jaringan guna mencapai sebuah solusi terhadap hal itu.

Sementara itu, di Indonesia menurut Koentjoro (2004) pelacuran merupakan hal yang tidak sesuai dengan Pancasila terutama sila pertama dan sila kedua. Dan bahkan pada tahun 1984 Dinas Sosial RI telah menetapkan bahwa pelacuran bertentangan dengan nilai sosial, norma dan moral agama karena merendahkan martabat manusia. Terlebih masyarakat Indonesia mayoritas adalah muslim yang mana dalam ajarannya melarang perzinahan karena termasuk dalam dosa besar. Akan tetapi, terdapat kesenjangan antara realitas dan menerapkan status pelacur dalam sistem hukum Indonesia. Hukum sipil Indonesia tidak menyebutkan hukuman untuk pelacur secara eskplisit, yang jelas hanya untuk mucikari dan perzinahan. Berhubungan seks dengan pelacur disebut sebagai perzinahan dan hukum sipil melarang praktek mucikari dan perzinahan. Akan tetapi, sekeras apapun larangan tersebut, pelacuran di Indonesia terus berkembang dan pada perjalanannya masyarakat seakan memberikan toleransi.

I.6. Metode dan Prosedur Penelitian

I.6.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *grounded theory*. Sebelumnya menurut Creswell (1998) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu proses *inquiry* tentang pemahaman berdasar pada tradisi-tradisi metodologis terpisah, jelas pemeriksaan bahwa menjelajah suatu masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun suatu kompleks, gambaran holistik, meneliti kata-kata, laporan-laporan memerinci pandangan-pandangan dari penutur asli, dan melakukan studi di pengaturan alami. (Creswell 1998 dalam Satori, 2009).

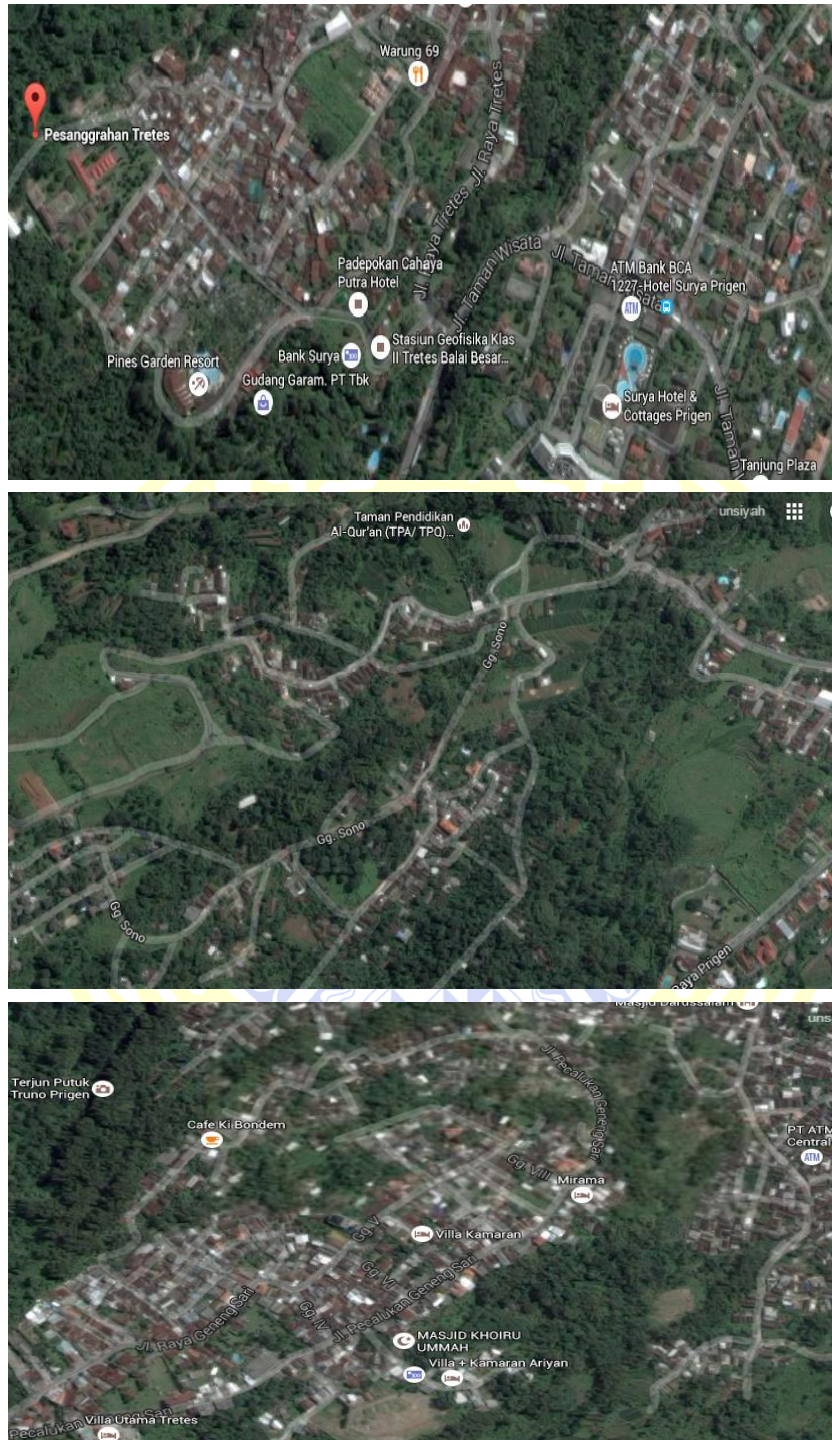
Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang memusatkan pandangan peneliti pada wacana-wacana atau gagasan-gagasan yang diproduksi oleh subyek peneliti sendiri. Penggunaan pendekatan kualitatif ini didasarkan pada pertimbangan bahwa *subject matter* dalam penelitian ini menyangkut proses dari tindakan yang ditunjukkan yang berisi pemikiran, ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam prostitusi sosial dalam melakukan praktek prostitusi.

Metode *Groundhed Theory* menurut Strauss bahwa tujuan dari setiap penelitian sosial bukanlah hanya menguji teori (bersarankan data kuantitatif atau yang dikuanti sedapat mungkin), melainkan “membangun teori” berdasarkan informasi kualitatif tentang dunia simbolis masyarakat (yang diperoleh lewat berbagai interpretasi dari aksi-aksi serta interaksi yang merefleksikan alam subjektivitas warga masyarakat) (Suyanto, Bagong dan Sutinah: 192).

1.6.2. Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, Menurut Neuman (2012) peneliti akan menyajikan gambaran yang spesifik mengenai situasi, penataan sosial atau hubungan. Selain itu, penelitian ini menyajikan gambaran mengenai jenis orang atau aktivitas sosial dan berfokus pada pertanyaan “bagaimana dan “siapa” (seberapa sering terjadi? Siapa yang terlibat?). Menyelidiki persoalan yang baru atau menerangkan alasan terjadinya suatu hal. Sedangkan menurut Satori dan Komariah (2013) penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dalam langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Dalam mengungkap tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data/fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan yang utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.

I.6.3. Lokasi Penelitian



Gambar 1.1. Lokasi Penelitian yakni Gang Sono, Pesanggrahan dan Watu Adem.

Tretes merupakan daerah pariwisata yang memiliki obyek wisata yang masih alami dan banyak diminati oleh pengunjung. Namun, dalam perjalanannya Tretes kemudian dikenal sebagai tempat para penjaja seks untuk mencicipi kenikmatan seksual yang ditawarkan di kawasan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Tretes kabupaten Pasuruan. Dimana tempat yang akan menjadi lokasi penelitian adalah di daerah lokalisasi Gang Sono, Pesanggrahan dan Watu Adem. Ketiga lokasi tersebut, sampai saat ini masih dan ramai digunakan sebagai tempat prostitusi di kawasan Tretes. Hal ini jauh berbeda dengan wilayah Gang Bakwan dan gang Dahlia yang sepi bahkan tidak ada.

Prostitusi di kawasan Tretes termasuk dalam kategori prostitusi yang terselubung. Hal ini dikarenakan tidak legalnya prostitusi yang ada di wilayah ini, sebagaimana telah tercantum dalam peraturan daerah Pasuruan No.10 tahun 2001. Perda tersebut memberikan legitimasi pada pemerintah untuk menutup praktek prostitusi di kawasan Tretes. Namun, pelarangan ini tidak mendapat tanggapan dari pelaku bisnis prostitusi di Tretes. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwasanya bisnis prostitusi ini kian marak, asal pelacur di Tretes beragam dari berbagai wilayah mulai daerah Malang, Lumajang, Jember, Ngawi, Lamongan, dan Pasuruan. Bahkan beberapa diantaranya dari luar Jawa Timur seperti Bandung, Jakarta, Medan, Tasikmalaya, Solo dan Batam dengan tingkat pendidikan mulai dari putus sekolah, sekolah dasar hingga tingkat SMU. Kian maraknya prostitusi yang terjadi di Tretes tidak terlepas dari peran parak aktor yang terlibat didalamnya yang terstruktur dan terintegrasi berdasarkan perannya masing-masing.

I.6.4. Subyek Penelitian

Subyek yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan sifat-sifat yang telah diketahui sebelumnya. Dalam pemilihan subyek ini, didasarkan pada pertimbangan tertentu yakni: (1) mereka menguasai dan memahami sesuatu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati yaitu terkait dengan sejarah prostitusi di Tretes dan mengetahui dengan jelas aktor-aktor yang terlibat dalam prostitusi. (2) mereka berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang diteliti yaitu menjadi pelacur, germo, pelayan maupun pelanggan dan lain sebagainya yang terlibat secara langsung dengan aktivitas prostitusi. (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.

Proses pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball*, dimana peneliti mendapatkan data informan dari informan pertama ke informan selanjutnya. Dalam penelitian ini informan pertama merupakan seorang Kasi Satpol PP di Pasuruan yang telah 2 tahun bertugas di kawasan Tretes dan informan ini yakni HAD merupakan warga asli Pandaan serta telah lama pula di Tretes yang tentunya memiliki pengetahuan yang banyak mengenai kehidupan di Tretes. Kemudian, informan HAD menjelaskan beberapa kehidupan dan aktor yang berada di Tretes secara detail kepada peneliti. Penelitian hari pertama, HAD mengenalkan peneliti kepada informan MON yang merupakan anggota dari Satpol PP yang bertugas juga di kawasan Tretes dan merupakan warga asli Tretes. Kemudian, dalam minggu selanjutnya informan HAD mengenalkan kepada pelacur WUL dan masyarakat yang berinisial DIM di wilayah Pesanggrahan.

Kemudian, minggu selanjutnya di perkenalkan dengan seorang germo DIN dan pelayan DIK di Gang Sono. Dalam minggu selanjutnya pula, informan memperkenalkan peneliti kepada informan VER yang merupakan seorang pelacur yang dalam perkenalannya lewat *booking* di sebuah tempat villa Srikaton di kawasan Tretes tersebut. Dan yang terakhir, informan diperkenalkan dengan germo di wilayah Watu Adem yakni germo KUS dan tokoh masyarakat HAR. Sehingga, dalam penelitian ini informan HAD merupakan pangkal yang memperkenalkan peneliti terhadap informan yang lainnya.

Sedangkan, untuk informan pelanggan peneliti mengetahui sendiri kehidupan informan tersebut merupakan pelanggan yang pernah bahkan seringkali bermain (mencicipi) dengan perempuan-perempuan yang berada di kawasan Tretes ataupun membawa perempuan-perempuan di luar Tretes untuk bermain di Tretes. Informan yang sudah dikategorikan digunakan untuk mencari informasi seputar jaringan sosial prostitusi di Tretes. Untuk detail dari informan dapat diprofilkan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Profil Informan

No	Inisial	Pekerjaan	Lama di Tretes	Sikap terhadap prostitusi Tretes	Peranan dalam jaringan sosial prostitusi Tretes
1	HAD	Satpol PP Pasuruan	5 tahun menjadi Satpol PP, di Tretes 2 tahun dan tinggal di Pandaan (dekat Tretes) dari kecil.	Dilema. Kontra karena melanggar Perda Pasuruan namun pro dikarenakan mengetahui dan mengenal sebagian besar dari aktor-aktor.	Melakukan razia di Tretes atas surat perintah dari kabupaten Pasuruan, namun juga membantu beberapa germo maupun pelacur ketika terjadi razia karena tidak tega dan sudah mengenal kehidupan mereka yang lama. Sehingga, perasaan kasihan sering dirasakannya pula.
2	MON	Anggota Satpol PP Pasuruan	2 tahun menjadi satpol PP di Tretes dan asli orang Tretes	Dilema. Kontra karena melanggar Perda Pasuruan namun merasa tidak tega ketika harus ada pergusuran.	Melakukan razia di kawasan Tretes sesuai dengan peraturan atasan. Selain itu, mengetahui jelas aktor-aktor yang berada di Tretes dan pernah pula mengantarkan (sebagai pelayan) dari beberapa pejabat pemerintahan untuk berwisata seksual dengan pelacur-pelacur yang berada di Tretes. <i>Pembookingan</i> juga dilakukan oleh informan ini.
3	WUL	Pelacur	3 tahun	Pro dengan prostitusi	Melayani pelanggan
4	VER	Pelacur	>1 tahun	Pro dengan prostitusi	Melayani pelanggan, dahulunya berdikari namun sekarang secara wisma
5	KUS	Germo	4 tahun	Pro dengan prostitusi	Mengakomodir seluruh kegiatan di wismanya baik pelacur, pelayan, berhubungan dengan calo, tokoh masyarakat dan masyarakat Tretes sendiri. Mengakomodir juga ketika terjadi razia dengan pihak satpol pp, polisi maupun dengan pihak pengadilan di Bangil.

6	DIN	Germo	9 tahun	Pro dengan prostitusi	Mengakomodir seluruh kegiatan di wisamanya baik pelacur, pelayan, berhubungan dengan calo, tokoh masyarakat dan masyarakat Tretes sendiri. Mengakomodir juga ketika terjadi razia dengan pihak satpol pp, polisi maupun dengan pihak pengadilan di Bangil.
7	DIK	Pelayan, tukang ojek, calo	7 tahun	Pro dengan prostitusi	Mengantarkan pelanggan bertemu dengan pelacur, mengantarkan menuju villa dan membantu memenuhi pula permintaan dari pelanggan misalnya membelikan miras.
8	HAR	Kasatgas Linmas Tretes	2 tahun menjadi ketua Linmas namun orang asli Tretes.	Dilema. Pro karena ada pelacur yang bekerja untuk ekonomi dan kontra ada juga pelacur yang bekerja hura-hura dan tentunya melanggar nilai maupun norma masyarakat	Menjaga ketertiban yang ada di kawasan Tretes dengan menegakkan ketertiban yang telah disetujui bersama.
9	DIM	Masyarakat (dukun)	49 tahun	Tidak begitu mempermasalahkan prostitusi (urusan pribadi setiap orang)	Menuruti permintaan dari pelanggan
10	RON	Pelanggan	4 tahun	Pro dengan prostitusi	Menyewa pelacur
11	TON	Pelanggan	2 tahun	Pro dengan prostitusi	Menyewa pelacur

I.6.4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian secara partisipatif namun tidak secara keseluruhan yakni peneliti terjun ke lapangan untuk mengetahui kehidupan mereka secara jelas dan detail dengan melakukan wawancara secara mendalam dan melakukan observasi di lingkungan Tretes, akan tetapi peneliti masih memiliki batasan yakni masih menjadi seorang peneliti tidak menjadi yang di

perankan oleh mereka. Peneliti berusaha hidup di lingkungan Tretes layaknya masyarakat Tretes pada umumnya dengan panduan dari beberapa orang yang telah mengenal Tretes. Maka, sesuai dengan di atas, penelitian ini menggunakan dua cara dalam pengumpulan data yakni secara wawancara mendalam dan observasi lapangan.

Wawancara mendalam ini merupakan salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi yang kaya dan mendetail, yang mungkin tidak dapat ditemukan pada kuesioner yang sifatnya tertutup. Dalam penelitian kualitatif ini, posisi peneliti sangat terlibat dengan informan dan informan memiliki posisi yang sangat penting karena informan yang lebih tahu keadaan yang terjadi pada lapangan. Maka, sesuai dengan hasil penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 informan.

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. (Nasution 2003 dalam Satori dan Komariah, 2013:106). Dalam penelitian ini menggunakan pedoman observasi lapangan dan perekam suara sebagai penunjangnya. Berikut ringkasan dari observasi yang dilakukan dalam penelitian ini:

Pertama, observasi ini dilakukan pada malam hari dimana peneliti mengamati perempatan yang menjadi pangkal tukang ojek di kawasan Tretes. Dalam observasi ini peneliti menggunakan sepeda motor, tidak beberapa lama kemudian seorang tukang ojek mendekati peneliti dan menawarkan villa. Kemudian, informan HAD kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah tukang

ojek yang sekaligus menjadi pelayan di kawasan Tretes. Kemudian, dalam observasi penelitian selanjutnya informan HAD mengajak peneliti menuju di Pesanggrahan. Dimana, pada waktu itu kondisi lingkungan Pesanggrahan sepi dikarenakan adanya isu pemberontakan dari FPI. Namun, peneliti juga menemui tukang ojek yang mengantarkan pelacur menuju villa-villa yang akan disewa dan seorang pelanggan yang diantarkan beberapa pelayan menuju salah satu wisma di Pesanggrahan.

Kedua, observasi kedua dilakukan pada sore hari di kawasan Gang Sono, yang kemudian peneliti mengetahui seorang pelacur yang terkena HIV/AIDS, dan beberapa kehidupan pelacur, germo, tukang ojek maupun pelayan di sore hari.

Ketiga, observasi ini dilakukan pada malam hari di wisma yang berada di Pesanggrahan. Dalam hal ini peneliti kemudian mengetahui secara langsung *pembookingan* yang dilakukan pelanggan dibantu oleh pelayan maupun tukang ojek. Tidak lama itu, peneliti masuk ke dalam wisma yang kemudian mengetahui cara berdandan dan interaksi yang dilakukan antara germo dengan pelacur yang ada di wisma tersebut. Setelah observasi di wisma, peneliti kemudian observasi di salah satu rumah warga di Tretes yang kemudian peneliti mengetahui lelaki tersebut adalah dukun di wilayah tersebut dan mengetahui juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelayan, tukang ojek, penjual makanan dan lain sebagainya yang diamati lewat dari rumah warga tersebut.

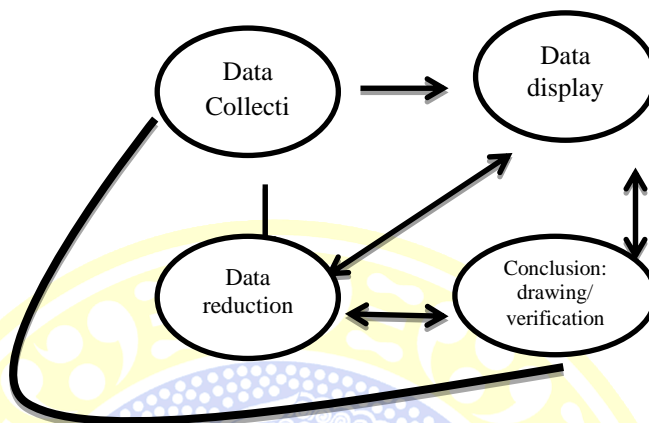
Keempat, observasi ini dilakukan pada malam hari dimana dalam hal ini peneliti diajak oleh informan HAD untuk *membooking* seorang pelacur namun tidak digunakan untuk kegiatan seksual hanya menemani dalam karaoke saja di

villa Srikaton. Informan HAD kemudian melakukan booking pelacur dan kemudian kami menunggunya. Tak lama kemudian pelacur yang telah di *booking* datang yang diantar oleh seorang pelayan dan beberapa menit kemudian teman dari informan HAD juga datang. Peneliti kemudian mengetahui bagaimana *pembookingan* yang dilakukan oleh pelanggan biasa dengan yang dilakukan informan yang merupakan Satpol PP yang tentunya memiliki kenalan yang lebih banyak sehingga *pembookingan* cukup dilakukan lewat pesan. Setelah perempuan yang *dibooking* tersebut datang, kemudian dilanjutkan dengan karaoke dan hidangan di depan mata peneliti yang terdapat banyak botol miras dan makanan ringan lainnya.

Kelima, observasi ini dilakukan juga pada malam hari dimana peneliti mengunjungi wilayah Watu Adem dan sekitarnya yang kemudian peneliti dan informan mendapatkan informasi jumlah wisma di wilayah tersebut semakin banyak dan tentunya jumlah pelacur bertambah banyak juga. Setelah itu, peneliti dan informan HAD menuju wilayah Pesanggrahan yang kemudian di perlihatkan rumah-rumah FPI dengan memberikan penjelasan kepada peneliti dan menuju rumah Kasatgas Linmas yang kemudian menjelaskan tugasnya di kawasan Tretes.

I.6.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Miles dan Huberman dengan model konsepnya:



Skema 1.2.

Bagan model Miles dan Huberman (1992) dalam Satori dan komariah (2013:218)

1. Reduksi data

Sebelum reduksi, pertama yang dilakukan adalah mencari data dengan melakukan *indepth interview*, observasi penelitian dan data-data yang diperoleh dari pihak Satpol PP maupun pihak kecamatan Prigen. Pertama-pertama yang dilakukan peneliti yakni dengan melakukan transkrip terhadap *indepth interview* yang telah didapatkan di lapangan, setelah itu dijadikan sebuah matriks untuk mempermudah peneliti menganalisis data. Kemudian, data tersebut di *mapping* atau reduksi sesuai dengan kategorisasi-kategorisasi sesuai dengan fokus permasalahan yang menjadi tolak penelitian ini. Sedangkan data observasi penelitian dan data-data dari pihak Satpol PP maupun kecamatan dijadikan sebagai pendukung juga dari hasil yang didapatkan di lapangan.

2. Penyajian data

Dari data hasil reduksi maupun mapping tersebut, kemudian dilakukan penyajian data sekaligus melakukan analisis dengan menggambarkan secara rinci dan akurat terhadap wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan. Dalam hal ini maka tujuan dari *display data* adalah untuk memudahkan dan memahami berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Data yang sudah didapatkan dari lapangan tersebut, setelah dilakukan penyajian data dan analisis kemudian diinterpretasi teoritik yang kemudian menghasilkan proporsi-proporsi baru yang berkenaan dengan jaringan sosial prostitusi di kawasan Tretes yang kemudian membantu dan mengarahkan proses penarikan kesimpulan dari keseluruhan data yang disajikan untuk menjawab fokus permasalahan yang telah dibuat.